

**AKTIVITAS HUMAS DALAM PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DITJEN PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
RI**



**AJRINA NUR ALAMSYAH
NIM: 1905311065**

**LAPORAN TUGAS AKHIR
HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Diploma III Politeknik

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2022**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Ajrina Nur Alamsyah
NIM : 1905311065
Program studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Aktivitas Humas Dalam Pelaksanaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian RI

Depok, 19 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Risya Zahrotul Firdaus, M. Si.
NIP 198609082020122006

Restu Jati Saputro, S.Si., M. Sc.
NIP 198609082020122006

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Dr. Dra. Iis Mariam., M.Si
NIP. 196501311989032001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ajrina Nur Alamsyah
NIM : 1905311065
Program studi : Diploma III Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Aktivitas Humas Dalam Pelaksanaan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian RI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Agustus 2022

Waktu : 08.00 – 09.00

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Risya Zahrotul Firdaus, M. Si.
NIP 198609082020122006

Penguji I : Imam Syafganti, S.Sos, M.Si.
NIP 197510122008121001

Penguji II : Riza Hadikusuma, M.Ag.
NIP 197404032001121002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, di mana atas berkat dan rahmat hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Laporan tugas akhir yang berjudul “**Aktivitas Humas Dalam Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI**” ini dilakukan agar terpenuhinya syarat kelulusan Diploma III Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akan terasa sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr Sc., Zainal Nur Arifin, Dip-Ing. HTL., M. T selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga
3. Taufik Akbar, SE., M.S.M selaku Kepala Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis.
4. Risyah Zahrotul Firdaus, S.I.Kom., M. Si. selaku dosen pembimbing 1 (materi) yang telah membimbing dan memberikan arahan serta menyediakan waktu, tenaga dan pikiran selama penyusunan laporan tugas akhir.
5. Restu Jati Saputro, S.Si., M. Sc. selaku dosen pembimbing 2 (teknis) yang telah membimbing dan memberikan arahan serta menyediakan waktu, tenaga dan pikiran selama penyusunan laporan tugas akhir.
6. Seluruh jajaran dosen Jurusan Administrasi Niaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Yani Rahmawati. S.P selaku subkoordinator Hukum dan Hubungan Masyarakat yang telah membimbing dan mengizinkan penulis melaksanakan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

8. Ibu Paramitha Ratna Puspawardhani yang telah ikut serta membimbing penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.
9. Dody Alamsyah dan Tuti Nurhayati selaku orang tua, serta Insani Churiyah Alamsyah selaku kakak dari penulis, yang selalu memberikan dukungan berupa motivasi dan finansial kepada penulis selama pengerjaan dan penyusunan tugas akhir.
10. Fida Wafiqoh, Febrina Ajeng Susianti dan Salma Aprilianti selaku salah satu teman dekat dari penulis yang telah memberikan dukungan moril dan media pengerjaan agar penulis tetap bisa melaksanakan penyusunan laporan tugas akhir.
11. Para sahabat dan teman-teman serta kerabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
12. Teman-teman seperjuangan AB6B dan teman-teman Administrasi Bisnis 2019.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala jasa yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang telah membantu penulis, dan semoga tulisan tugas akhir ini dapat membantu atau bermanfaat bagi semua pihak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

Depok, 27 Juli 2022

Ajrina Nur Alamsyah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 9 |
| 1.1 Latar Belakang | 9 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 12 |
| 1.3 Tujuan Penulisan..... | 12 |
| 1.4 Manfaat Penulisan..... | 13 |
| 1.5 Metode Pengumpulan Data..... | 14 |
| 1.6 Metode Penulisan Data..... | 15 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2.1 <i>Public Relations</i> | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2 <i>Public Relations</i> dalam Pemerintah | Error! Bookmark not defined. |
| 2.3 Pelayanan Publik..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2.4 Informasi Publik..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI/INSTANSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.1 Sejarah Kementerian Pertanian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.2 Sejarah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian | Error! |
| Bookmark not defined. | |



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| 3.3 | Visi dan Misi..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3.4 | Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1 | Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik (PPID) | Error! Bookmark not defined. |
| 4.2 | Proses Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Error! Bookmark not defined. |
| 4.3 | Kekurangan Pelaksanaan PPID yang Dihadapi Hubungan Masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB V PENUTUP | | 16 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 16 |
| 5.2 | Saran..... | 17 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 18 |
| LAMPIRAN | | 20 |





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.4 Struktur Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 Ruang Layanan Informasi **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.2 *Flowchart* Permohonan Informasi (*Offline*)**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.2 *Flowchart* Permohonan Informasi (*Online*)**Error! Bookmark not defined.**





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Informasi Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian .. **Error!**
Bookmark not defined.

Tabel 4.2 Proses Pelayanan Informasi Publik (*Face to Face*) **Error!** **Bookmark not defined.**

Tabel 4.2 Proses Pelayanan Informasi Publik (*Online*) **Error!** **Bookmark not defined.**





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan milik swasta maupun instansi pemerintah atau organisasi seringkali menuntut para pekerjanya untuk menggunakan strategi yang tepat bagi jasa layanan atau produk yang dipasarkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan bertahan atau memenangkan persaingan yang ada di dunia kerja. Pihak perusahaan juga harus mengamati perkembangan dari setiap persaingan antar perusahaan atau organisasi yang selalu terjadi setiap harinya dan ikut berkembang menjadi lebih baik lagi agar memiliki citra yang bagus serta dapat dipercaya oleh masyarakat.

Sebuah perusahaan atau organisasi harus dapat mempertahankan citra baik yang telah terbentuk, maka dari itu dalam sebuah perusahaan atau organisasi diperlukannya seorang *public relations*. Menurut penjelasan dari Jefkins seperti dikutip oleh Purba (2018:3), *public relations* merupakan segala cara dari sebuah bentuk komunikasi, baik terencana antar organisasi dengan seluruh khalayak ataupun secara internal maupun eksternal untuk mencapai semua tujuan spesifik yang didasari pada rasa saling mengerti atau pengertian.

Lebih lanjut secara terperinci, *public relations* dalam pemerintahan merupakan lanjutan dari sebuah kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang sesuai terhadap kepentingan individu atau suatu golongan, agar instansi atau lembaga dimana *public relations*/hubungan masyarakat itu berada mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya (Rachmadi seperti dikutip oleh Lani & Handayani, 2021:133).

Penjelasan beberapa ahli yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa, seorang *public relations* memiliki upaya untuk mencakup semua hal yang dilaksanakan secara berkesinambungan serta terencana dalam rangka memelihara

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dan menciptakan tujuan atau hal baik lainnya untuk saling mengerti antar suatu perusahaan atau organisasi dengan masyarakat luas, secara garis besar hubungan masyarakat pemerintah memiliki tugas memberikan suatu informasi yang diikuti dengan penjelasan untuk masyarakat atau publik mengenai langkah/tindakan dan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang baik antar instansi/lembaga dengan masyarakatnya. Jadi, selaku mulut atau juru bicara pemerintah yang harus mengetahui segala kebijakan, latar belakang kebijakan yang telah/akan diputuskan dan harapan dari suatu tujuan ke depannya, suatu hubungan masyarakat, agar informasi yang tersampaikan cepat dan tepat serta berkualitas, maka koordinasi harus dilakukan secara baik dengan semua unit kerja dari instansi yang terlibat di dalamnya.

Hubungan masyarakat pemerintah itu sendiri memiliki fungsi bagi lembaga/instansinya, fungsi hubungan masyarakat pemerintah menurut ahli adalah hubungan masyarakat pemerintahan memiliki fungsi penting menolong pimpinan dalam mempertahankan serta meningkatkan kualitas dari instansinya tersebut (Londa seperti dilutip oleh Lani & Handayani, 2021:132).

Dilihat dari pemaparan di atas, agar masyarakat dapat mengetahui informasi penting terkait pemerintah secara transparan atau terbuka, hubungan masyarakat dituntut untuk memberikan informasi se jelas mungkin. Pada era yang memiliki teknologi sudah maju ini, masyarakat menuntut kemudahan dalam memperoleh informasi yang diinginkan. Isu utama dalam memberikan pelayanan adalah media, waktu dan jarak. Di sisi lain, tuntutan dari era keterbukaan informasi, Badan Publik pemerintahan didorong untuk terus meningkatkan layanan informasi publiknya.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting dari sebuah negara demokratis, demi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat hal itu dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan negara yang baik. Keterbukaan informasi ada untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, akuntabilitas, transparansi dan kesetaraan lapisan masyarakat. Salah satu hal penting untuk menuntut adanya keterbukaan informasi di Indonesia yaitu dilandaskan oleh Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

UU ini mengusahakan adanya era keterbukaan informasi yang mendorong agar badan publik bisa membuka akses sebesar mungkin melayani informasi yang bertanggung jawab serta transparan kepada masyarakat. UU KIP Pasal 7 menuntut agar sistem informasi dan dokumentasi dapat dikembangkan serta dibangun oleh Badan Publik agar penataan informasi publik bukan hanya menjadi lebih baik, tetapi juga lebih efisien agar layanan informasi dapat digunakan secara cepat, murah dan mudah. Dari sisi lain, batasan waktu 10 hari kerja dan diizinkan untuk perpanjangan selama 7 hari kerja kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar diberitahukan kepada pemohon informasi publik secara tertulis, diberikan berdasarkan Pasal 22 UU KIP.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi dijelaskan bahwa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi Badan Publik dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada peraturan ini. Tugas yang dimiliki oleh PPID adalah melayani pemohon yang meminta informasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip PPID, yakni hanya menyediakan informasi yang dikuasai dengan menggunakan anggaran Badan Publik. Pada era keterbukaan informasi publik ini, bukan hanya informasi-informasi penting saja yang dituntut oleh masyarakat, namun juga bagaimana pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat serta kemudahan dalam mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan kebijakan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dituliskan, dengan ini penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **“Aktivitas Hubungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI”**.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang diteliti oleh penulis berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pelayanan informasi publik yang dilakukan dan disediakan oleh Hubungan Masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI dalam pelaksanaan PPID?
- b. Bagaimana proses pelayanan informasi publik PPID yang dilakukan oleh Hubungan Masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI?
- c. Apa saja kekurangan pelaksanaan PPID pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI yang ditangani oleh bagian Hubungan Masyarakat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari laporan tugas akhir ini yang diharapkan dapat terpenuhi, adalah:

- a. Untuk memaparkan bentuk pelayanan informasi yang dilakukan dan disediakan oleh Hubungan Masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI dalam pelaksanaan PPID.
- b. Untuk memaparkan proses pelayanan informasi publik PPID yang dilakukan oleh Hubungan Masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.
- c. Untuk memaparkan apa saja kekurangan pelaksanaan PPID pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan dari penulisan tugas akhir yang dipaparkan oleh penulis, diharapkan terdapat beberapa manfaat penulisan, di antaranya:

- a. Bagi penulis, penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat seperti:
 - 1) Penulis dapat secara langsung mempraktikkan teori-teori yang telah diajarkan selama perkuliahan.
 - 2) Penulis mendapatkan wawasan lebih luas mengenai dunia kerja dan dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya, penulis sudah siap secara pengetahuan dan pengalaman.
 - 3) Penulis mampu mengumpulkan, menganalisis data serta menuliskan susunan data untuk salah satu syarat kelulusan, yaitu penyusunan laporan tugas akhir untuk pendidikan jenjang D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Negeri Jakarta.
- b. Bagi dunia ilmu pengetahuan, penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat seperti:
 - 1) Harapan dari penulis agar hasil dari penulisan laporan tugas akhir ini dapat menjadi serta referensi bagi mereka yang ingin menambah wawasan atau ilmu pengetahuan di bidang PR, terutama PR Pemerintah.
 - 2) Penulis berharap agar apa yang telah dipaparkan atau dijelaskan dalam penulisan laporan tugas akhir ini dapat menjadi suatu inspirasi atau bahkan pembeding bagi perusahaan atau organisasi lain dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat luas secara *online* maupun *offline*, serta agar masyarakat dapat memahami informasi seperti apa yang bisa dipaparkan kepada publik dan informasi seperti apa yang tidak bisa dipaparkan kepada publik.
- c. Bagi organisasi/instansi, penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat seperti:
 - 1) Penulisan tugas akhir dari penulis dapat menjadi bahan referensi terhadap langkah pengerjaan yang telah diterapkan maupun mengembangkan yang

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sudah diterapkan di instansi dalam bidang pelayanan informasi publik agar dapat menjadi lebih baik lagi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, adapun sebagai berikut:

a. Observasi

Pertama adalah metode observasi. Menurut salah satu ahli terkait metode observasi, menjelaskan bahwa “metode observasi diperlukan usaha-usaha pengamatan secara langsung pada tempat yang akan diteliti atau diselidiki untuk mengumpulkan data atau keterangan” (Arikunto seperti dikutip oleh Joesyiana, 2018:94).

Dalam menggunakan metode observasi ini, penulis mengamati kegiatan sekitar atau semua yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik Hubungan Masyarakat Kementerian Pertanian RI lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, seperti contohnya adalah bentuk pelayanan informasi publik yang dilakukan, proses pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, hambatan dan resiko dari pelaksanaan PPID Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

b. Wawancara

Metode kedua yang penulis gunakan adalah metode wawancara, Sugiyono (2016:72) menjelaskan bahwa “wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab yang merujung menjadi sebuah garis kesimpulan atau arti dalam topik tertentu yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi atau ide.”

Metode wawancara ini dilakukan dengan orang yang berwenang, yakni, Yani Rahmawati sebagai subkoordinator Hubungan Masyarakat yang mewakili PPID, terkait pengelola informasi dan dokumentasi pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

c. Studi Pustaka

Metode yang terakhir adalah studi pustaka. Menurut ahli, “studi pustaka adalah kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka yang setelah itu dibaca dan ditulis lalu diolah untuk bahan penelitian tersebut” (Zed seperti dikutip oleh Melfianora, 2014: 3).

Dalam metode studi kepustakaan ini, penulis menggunakan buku-buku, jurnal yang berkaitan, maupun Undang-Undang yang relevan dengan penulisan tugas akhir.

1.6 Metode Penulisan Data

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, metode penulisan data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut pendapat ahli, “metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengecekan kebenaran data atau informasi yang diperoleh, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi” (Sugiyono, 2016:9).

Alasan digunakannya metode kualitatif deskriptif ini adalah, agar penulisan dapat menerangkan, menjelaskan dan menjawab serta mempresentasikan secara nyata mengenai apa saja yang dituliskan, sehingga penulis dapat mengolah data secara terperinci, aktual dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan mengenai Aktivitas Hubungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, yaitu:

- a. Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 2009 yang bertujuan dapat mewujudkan sistem ideal pelayanan publik pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dalam pelaksanaan PPID yang dilakukan oleh hubungan masyarakat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dapat diketahui yaitu bentuk pelayanan informasi yang dilakukan oleh Hubungan Masyarakat pelaksana PPID dilakukan secara dua bentuk, yaitu secara *offline (face to face)* dan *online*, hal ini dilakukan agar masyarakat merasa nyaman dan percaya dengan sistem pelayanan informasi yang diadakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, serta agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi apa saja yang ditampilkan kepada khalayak luas;
- b. Adapun proses pelayanan informasi PPID dilakukan sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dengan adanya standar operasional tersebut, proses pelayanan dilakukan melalui dua cara, yaitu proses pelayanan secara *offline (face to face)* dan *online*, namun, dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, waktu untuk proses pelaksanaan pelayanan informasi PPID masih belum efektif; dan
- c. Ada beberapa kekurangan yang masih terjadi dalam pelaksanaan pelayanan informasi PPID ini, PPID Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian belum secara maksimal dapat menerapkan pelayanan informasi PPID sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2 Saran

Berdasarkan penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa saran yang harus diperhatikan agar dapat merubah pelayanan informasi publik PPID menjadi lebih baik, yaitu:

- a. melakukan pendataan secara spesifik pada masing-masing unit kerja setiap minggunya terkait perkembangan informasi yang ada;
- b. Melengkapi Daftar Informasi yang Dikuasai dengan menambah jumlah data dan informasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk ditampilkan pada *website* yang tersedia;
- c. menentukan secara terjadwal *shift* untuk petugas PPID agar dapat lebih efektif dan cermat dalam melakukan pelayanan; dan
- d. Melakukan sosialisasi terkait pemahaman tentang PPID kepada publik maupun staf atau pejabat yang terdapat dalam Kementerian Pertanian RI sehingga dapat meminimalisir kendala dalam penyediaan informasi karena terjadi pemahaman yang sama.



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR PUSTAKA

- Arif, N. N., & Saputra, M. A. 2019. *Kompetensi Baru Public Relations (PR) Pada Era Artificial Intelligence: Case Study Praktisi PR di Indonesia*. *Jurnal Sistem Cerdas* Vol. 2(1), 8. (<https://apic.id/jurnal/index.php/jsc/article/view/19>, diakses 6 Mei 2022)
- Desyiana, Kiki. 2018. *Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR* Vol. 6 (2), 94. (<https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/article/view/2740>, diakses 6 Mei 2022)
- Hani, O. P. & Handayani, B. 2021. *Peranan Hubungan Masyarakat Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik*. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 9 (2), 137. (<https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/view/4071>, diakses 6 Mei 2022)
- Mukrom, Zaenal & Laksana, M. W. 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government And Good Governance*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Mulyadi, dkk. 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Purba, Budiman. 2018. *Pengaruh Public Relations Terhadap Peningkatan Pengguna Jasa di Bandara Internasional Kualanamu Kab. Deli Serdang*. *Jurnal Network Media* Vol. 1 No. 1. (<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/junetmedia/article/download/604/568> diakses 30 Mei 2022)
- Sari, B. W. N. 2012. *Hubungan Masyarakat Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekretariat Jenderal Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik. 2019. *Petunjuk Teknis Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Publik*. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprawoto. 2018. *Government Public Relation*. Yogyakarta: Prenadamedia Group.
- Tulung, F. H. dan Suryopratomo. 2015. *PR IN GOVERNMENT*. Jakarta: Bamboedoea Komunikasi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Winarno, Ronny. 2019. *Good Governance Based Public Services*. Jurnal Notariil Vol 4 (1), 3. (<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/download/115/5/pdf>, diakses 6 Mei 2022)
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar wawancara

Identitas Responden

Nama Responden/Jabatan: Yani Rahmawati. S.P/Subkoordinator Hukum dan Hubungan masyarakat

Tempat Wawancara : Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Waktu Wawancara : 27 April 2022

1. Siapa saja yang dapat bertugas sebagai pelaksana PPID dalam kehumasan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian?
2. Apa perbedaan dari form 1A dan 1B?
3. Apa saja atau bagaimana isi dari form 1A dan 1B?
4. Apa yang dipaparkan dalam standing banner di pintu masuk gedung areal, lobi gedung D, Lt. 3, 8 dan 9?
5. Bagaimana tata cara permohonan dan sengketa informasi publik di Humas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian?
6. Bagaimana cara penyelesaian dari permohonan dan sengketa informasi publik yang diajukan?

Berkas apa saja yang harus disiapkan oleh Hubungan Masyarakat pelaksana PPID Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam menyelesaikan sengketa informasi publik?